

LATIHAN SOAL PENGADAAN BMN

Essay

1. Jelaskan **Prinsip-Prinsip Pengadaan BMN!**
 1. **Efisien**: menggunakan sumber daya yg optimal dpt diperoleh b/j dlm kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai yg direncanakan
 2. **Efektif**: dgn sumber daya yg ada dpt memperoleh b/j yg punya nilai manfaat maksimal
 3. **Transparan**: pemberian informasi yg lengkap kpd calon peserta
 4. **Terbuka**: semua penyedia b/j berkesempatan ikut pengdaan
 5. **Bersaing**: pbj terbuka bagi penyedia b/j secara persaingan sehat
 6. **Adil**: perlakuan sama thd calon penyedia b/j
 7. **Akuntabel**: pertj pelaksanaan pbj
2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat etika pengadaan barang dan Jasa Pemerintha !
 - a. melaksanakan tugas secara tertib
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi
 - c. tidak saling mempengaruhi yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat
3. Sebutkan dan beri contoh jenis pemenuhan pengadaan barang dan jasa !
4. Gambarkan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah !
5. Jelaskan dan beri contoh, apa yang dimaksud dengan Solusi Asset, Solusi Non Asset, Purchasing, Non Purchasing dalam pengadaan Barang !

Pilihan Ganda (Manajemen Aset) :

1. Pengadaan BMN untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi K/L (Pengguna Barang) harus merujuk kepada ...

- A. **RKBMN**
 - B. Renstra
 - C. LHP Pemeriksa
 - D. Perintah Pengguna Barang
2. Pada PP 27 Tahun 2014 terkait Pengadaan BMN diatur dalam pasal ...
- A. menetapkan Perencanaan Kebutuhan BMN
 - B. menyusun pedoman pembinaan BMN
 - C. menyetujui pemindahtanganan BMN
 - D. **mengajukan usulan Perencanaan Kebutuhan BMN**
3. Wewenang dan Tanggungjawab Pengguna Barang terkait pengadaan BMN yaitu ...
- A. menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara
 - B. **melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
 - C. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang
 - D. menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang
4. Berdasarkan PP 27 Tahun 2014, Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ...
- A. **Efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel**
 - B. Adil, Bertanggung jawab, Efisien, efektif, transparan, tepat waktu
 - C. Professional, transparan, prediktable, komprehensif, ekonomis dan efisien
 - D. Berjangka pendek, transparan, bernilai guna, HBU, menghasilkan PNBPN , efisien
5. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden yang berlaku saat ini untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu ...
- A. Perpres 54 Tahun 2010
 - B. Perpres 70 Tahun 2012
 - C. Perpres 4 Tahun 2015
 - D. **Perpres 16 Tahun 2018**

6. Untuk mengembalikan maksud awal dari pengadaan Barang Milik Negara, maka Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang perlu secara proaktif melakukan langkah-langkah...
 - A. Sosialisasi Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - B. penataan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan
 - C. mengupayaan peningkatan PNPB yang berasal dari pemanfaatan BMN
 - D. menyusun regulasi terkait pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan jaman
7. Pemenuhan BMN dengan cara membeli dari pihak ketiga (penyediaan Barang) disebut ...
 - A. Solusi aset
 - B. Solusi non aset
 - C. Pengadaan
 - D. Non Purchasing
8. Satker KPPN Mojokerto meminjam mobil dinas milik KPP Pratama Mojokerto yang tidak digunakan, pemenuhan aset seperti ini disebut ...
 - A. Cara yang efisien dan efektif
 - B. Solusi Aset
 - C. Solusi Non Aset
 - D. Purchasing
9. Cara pemenuhan BMN menurut penjelasan 27 Tahun 2014 yaitu ...
 - A. Solusi Aset, Solusi Non aset atau dengan mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien
 - B. Pengadaan, Peminjaman, dan Solusi Aset
 - C. Cara yang efisien dan Efektif, Sewa, dan Sewa Beli
 - D. Solusi Aset, Purchasing, dan Tukar Menukar
10. Pengertian Solusi Non Aset yaitu ...
 - A. alternatif-alternatif penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut serta menghindari alternatif yang hanya terfokus pada pengadaan aset yang tanpa disertai optimalisasi aset- aset yang telah ada
 - B. pemenuhan kebutuhan aset dengan cara pengadaan atau cara lain yang pada dasarnya untuk menambah jumlah aset yang dimiliki guna menjalankan tugas dan fungsi dengan baik
 - C. solusi yang bisa ditempuh dalam rangka memenuhi kebutuhan barang milik negara dengan cara memenuhi kebutuhan aset dengan cara meminjam, menyewa maupun membeli barang milik negara sehingga BMN bertambah
 - D. meminta kepada pihak ketiga (Swasta) untuk membangun aset yang dibutuhkan negara dengan cara kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu tertentu dan pada saatnya nanti menjadi milik negara (BMN)

11. Pihak-pihak pada K/L yang terlibat dalam pengadaan BMN yaitu ...
- A. **Pengguna Barang, PPK, ULP, PPHP**
 - B. KPA, PP SPM, Bendahara dan Pejabat Pengadaan
 - C. ULP, Pejabat Pengadaan, PPHP dan Konsultan
 - D. Bendahara Barang, KPA, Penguji SPP dan PA
12. Pengertian Pengadaan BMN menurut Perpres yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu ...
- A. kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa
 - B. **kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan**
 - C. upaya memenuhi kebutuhan Barang Milik Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik
 - D. pemenuhan asset dengan cara solusi asset maupun solusi non asset yang dibiayai dari APBN maupun sumber lain yang sah
13. Menurut Penjelasan PP 27 Tahun 2014, perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan...
- A. **pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah**
 - B. ketersediaan dana dalam DIPA, Kesepakatan dengan DPR RI, kebutuhan BMN yang tertuang dalam rencana kebutuhan barang milik negara sesuai dengan satker pada masing-masing kementerian/Lembada serta OPD
 - C. kebutuhan BMN sesuai dengan masing-masing satker, kondisi barang yang rusak berat maupun rusak ringan, ketersediaan BMN pada saat ini dan rencana kebutuhan optimal dimasa mendatang
 - D. kondisi bencana alam yang sifatnya tidak terduga, perencanaan yang pasti, kebijakan pimpinan/kepala Lembaga dalam memenuhi kebutuhan barang untuk menunjang tugas dan fungsi
14. Garis besar Pengadaan Barang dan Jasa yaitu ..
- A. Persiapan, Pelaksanaan dan evaluasi
 - B. **Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan**
 - C. RKBMN, Optimalisasi dan pengadaan
 - D. Penawaran, seleksi dan penetapan
15. Jenis Pengadaan Barang dan Jasa menurut Perpres 16 Tahun 2018 meliputi
- A. Barang, Jasa lainnya, Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi
 - B. Swakelola, Penyedia, Barang, jasa

- C. Pekerjaan melalui penyedia Barang, Swakelola, sewa dan Beli
- D. Pinjam Pakai, Jasa Lainnya, Konstruksi dan Sewa

16. Satker Kanwil Perbendaharaan Lampung membeli mobil dinas, jenis pengadaan seperti ini jenis pengadaan ...
- A. Konstruksi
 - B. Barang
 - C. Modal
 - D. Kendaraan dan Mesin
17. Satker KPPN Saumlaki membangun gedung kantor 2 (dua) lantai beserta sarana dan prasarana bangunan lainnya, jenis pengadaan seperti ini jenis pengadaan ...
- A. Barang
 - B. Pekerjaan konstruksi
 - C. Jasa lainnya
 - D. Pembangunan
18. Satker Sekretariat Ditjen Perbendaharaan membuat kajian pengembangan organisasi yang dilaksanakan oleh Pengkaji/Peneliti dari salah satu Universitas, jenis pengadaan seperti ini jenis pengadaan ...
- A. Kontraktual
 - B. Jasa
 - C. Jasa Konsultansi
 - D. Jasa Lainnya
19. Pengertian Jenis Pengadaan Jasa Lainnya yaitu ...
- A. jasa non-Konsultansi/jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
 - B. jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
 - C. keseluruhan / sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
 - D. setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
20. Cara pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ada 2 yaitu ...
- A. Swakelola dan Pembelian

- B. Sewa dan Beli
- C. Swakelola dan melalui Penyedia
- D. Membangun sendiri dan Menyerahkan kepada pihak lain

21. Pengertian pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola yaitu ...

- A. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat
- B. Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Kontrak
- C. Cara memperoleh barang/jasa pemerintah dengan cara membeli atau metode lain dengan dana berasal dari APBN/APBD
- D. Cara memperoleh barang/jasa pemerintah baik berupa barang, jasa, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan cara meminta pihak lain dan bekerjasama dengan pengelola barang

22. Satker Balai Diklat Keuangan Makasar mengadakan 200 unit computer dengan cara dikontrakkan kepada pihak penyedia computer, maka cara pengadaan seperti ini disebut cara ...

- A. Swakelola
- B. Kontrak
- C. Penyedia
- D. Pengadaan

23. Diantara tujuan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yaitu ...

- A. Meningkatkan PDN, Tepat kebutuhan, meningkatkan peran UMKM
- B. Meningkatkan peran industry kreatif, penunjukan langsung, memenangkan UMKM
- C. Industri nasional, pemerataan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional
- D. Pengadaan barang berkelanjutan, meningkatkan perang pelaku usaha nasional, kompetisi secara bebas

24. Upaya untuk meningkatkan kualitas identifikasi kebutuhan barang/jasa metupakan bentuk kebijakan pengadaan yaitu ..

- A. Meningkatkan kualitas perencanaan PBJ
- B. Mendorong PPDN dan SNI
- C. Memperkuat Kelembagaan & SDM PBJ Termasuk Agen Pengadaan
- D. Melaksanakan PBJ yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif

25. Pernyataan berikut yang benar terkait beberapa prinsip pengadaan barang yaitu ...

- A. Efisien, Efektif, Bersaing, adil, transparan, terbuka dan akuntabel
- B. Terbuka, merata, professional, akuntabel, ekonomis, efektif, integritas
- C. Efisien, kompetitif, akuntabel, transparan, jujur, anti KKN, dan Terbuka
- D. Adil, terbuka, professional, ekonomis, efektif, professional dan jujur